

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan, prinsip otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom dan melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan warga negara.

Selanjutnya dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi dan kekhasan daerah. Otonomi daerah yang bertanggung jawab adalah otonom yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggara otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama dan mencegah ketimpangan antara daerah, hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintahan, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian, otonomi atau desentralisasi akan membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat di daerah maupun pemerintahan nasional. (Ryass Rasyid, 2007 : 32).

2.2 Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disebut Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintahan daerah itu dapat hubungan pelayanan umum, keuangan, pemanfaatan, sumberdaya, dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara adil dan selaras. (Ni'matul Huda, 2006 : 340)

Penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, pasal 10 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi:

- a. Politik luar negeri.
- b. Pertahanan.
- c. Keamanan.
- d. Yustisi.
- e. Moneter dan fiskal nasional.
- f. Agama.

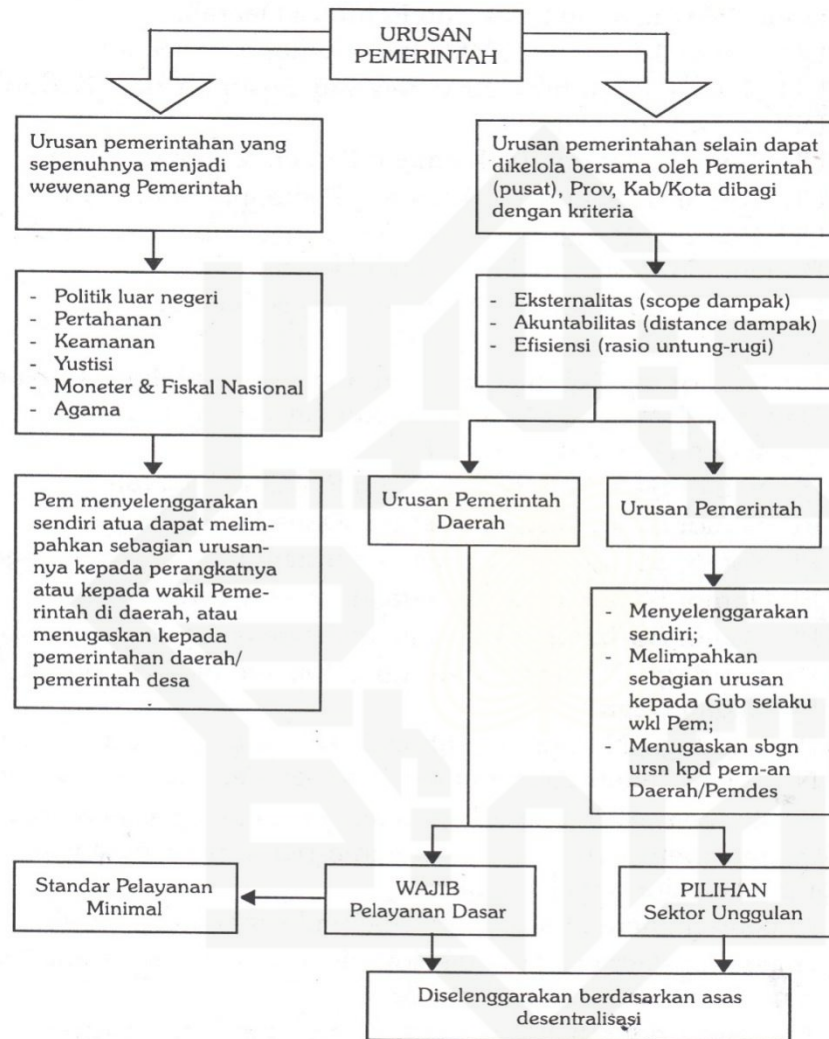
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilimpahkan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah atau pemerintahan desa. Pembagian urusan berdasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan. Urusan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.

Dalam penyusunan APBD yang harus diperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan Antar Pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan ini dapat digambarkan seperti skema dibawah ini.



Gambar 2.1 Pembagian Urusan Pemerintahan

Dalam peraturan pemerintahan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi:

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional
6. Agama

b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan yaitu:

1. Urusan pemerintahan wajib
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - f. sosial.
2. Urusan pemerintahan pilihan
 - a. kelautan dan perikanan
 - b. pariwisata

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. pertanian
 - d. kehutanan
 - e. energi dan sumber daya mineral
 - f. perdagangan
 - g. perindustrian
 - h. transmigrasi.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala daerah. Urusan pemerintahan umum meliputi:
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
 - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
 - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

2.3 Peran Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintahan pusat.

Selain itu pemerintahan daerah juga peran dalam melaksanakan desentralisasi, dekonsentralisasi dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintahan di daerah yang otonom yaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem pemerintahan NKRI.
2. Dekonsentralisasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan atau instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan yang diberikan pemerintahan kepada daerah atau desa dari pemerintahan provinsi kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten/kota atau desa serta dari pemerintahan kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas tersebut.

2.4 Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintahan daerah menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

2.5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam suasana reformasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami amandemen sebanyak empat kali (tahun 1999,2000,2001 dan 2002) dan khusus menyangkut pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan dan penambahan isi yang cukup signifikan.

Sesuai dengan kondisi politik saat ini maka rumusan tentang kedudukan DPRD dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami perubahan mendasar, hal itu terlihat dalam rumusan tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rumusan pasal 3 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan:

- a. Pemerintahan daerah Provinsi yang terdiri atas Pemerintahn Daerah Provinsi dari DPRD Provinsi.
- b. Pemerintahan kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

Lebih jauh lagi dalam pasal 148 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dirumuskan:”DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”

1. *Pimpinan DPRD*

Sesuai isi pasal 57 UU No 22 Tahun 2003 disebutkan pimpinan DPRD provinsi terdiri dari seorang ketua dan sebanyak-banyaknya tiga orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD Provinsi dalam sidang pimpinan DPRD provinsi. Sedangkan untuk DPRD Kabupaten/kota adalah seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD kabupaten/kota dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten/Kota (pasal 73 ayat 91)).

2. *Kedudukan dan fungsi DPRD*

Kedudukan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan pasal76 UU No 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR,DPD, DPRD

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang kedudukan sebagai lembaga pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Adapun fungsi dari DPRD sesuai Undang-Undang No 23 tahun 2014 adalah:

- a. Legislasi
- b. Anggaran
- c. Pengawasan
3. *Tugas dan wewenang DPRD*

Tugas dan wewenang DPRD sesuai dengan isi pasal 154 UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah:

- a. Membentuk perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Wali Kota.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD Kabupaten/Kota.
- d. Memilih Bupati/Wakil Kota.
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/ Wali kota kepada menteri melalui Gubernur sebagai Wakil pemeritahan pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib.

4. *Hak dan kewajiban DPRD*

Dalam pasal 159 UU No 23 tahun 2014 tentang pemeritahan daerah disebutkan bahwa DPRD mempunyai hak interpelasi, hak angket serta hak menyatakan pendapat.

Hak interpelasi adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk meminta keterangan kepada Bupati/Wali Kota mengenai kebijakan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hak angket adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara.

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah Kabupaten/Kota disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksana hak interpelasi dan hak angket.

2.6 Fungsi DPRD

Menurut UU No 23 tahun 2014 DPRD merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan yang tinggi untuk mengawasi pelaksanaan anggaran, untuk itu fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD harus jelas agar kinerja pemerintahan DPRD semakin meningkat terutama dalam penganggaran keuangan negara (APBD).

Menurut UU No 23 Tahun 2014 fungsi DPRD adalah:

- a. Fungsi legislasi, untuk membentuk peraturan daerah bersama gubernur/ bupati / walikota
- b. Fungsi anggaran, untuk menyusun dan menetapkan APBD didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- c. Fungsi pengawasan, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang – undang, perda dan keputusan gubernur / bupati walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

Berdasarkan teori mengenai fungsi DPRD, yang ditekankan dalam penelitian ini adalah fungsi anggaran. Alasannya karena fungsi anggaran yang merupakan bagian yang terpenting dalam pelaksanaan perencanaan daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.7 Fungsi Anggaran DPRD

Menurut Wasistiono dan Yonatan (2007 : 107) bahwa fungsi penganggaran mempunyai peran sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing. Anggaran pada tingkat daerah (APBD) mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan anggaran pada tingkat nasional (APBN), yaitu sebagai alat untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal secara vertikal (proporsionalitas pendapatan lukratif), selain itu juga mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal (membandingkan antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dengan kemampuan fiskal (*fiscal capacity*) untuk menentukan atau menghitung celah fiskal (*fiscal gap*). Selain itu juga mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dari menyebar dan melimpahnya efek pelayanan publik dan pelayanan sipil (*inter jurisdictional spill over effect*), yaitu efek menyebar atau eksternalitas ke daerah-daerah lainnya.

Fungsi penganggaran merupakan salah satu fungsi terpenting dari DPRD, sehingga para anggota DPRD perlu memahami perbedaan fungsional dalam hal penganggaran dibandingkan dengan fungsi pemerintahan daerah dalam hal penganggaran, dalam rangka penyusunan dan penetapan RAPBD menjadi APBD pada setiap kabupaten/kota. Karena itu perbedaan mendasar yang menentukan tingkat kerja penganggaran DPRD perlu dijabarkan, guna meminimalisasi ketidaksamaan persepsi fungsional antara fungsi penganggaran pemerintahan daerah dengan fungsi penganggaran DPRD.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan fungsional dari kedua institusi tersebut dalam hal penganggaran terletak pada tujuan masing-masing yang hendak dicapai. Hal ini dijelsakan oleh Djojosoekarto dan Djayasinaga (2004) sebagai berikut:

Tujuan fungsi penganggaran bagi pemda, APBD merupakan instrumen pemerintahan tanggungjawab pemerintahan sebagai kontrak sosial antara pemerintahan dengan rakyat. Kondisi ini akan semakin relevan ketika bupati dipilih secara langsung. Tujuan fungsi penganggaran bagi DPRD, APBD lebih bersifat politis dimana setiap pilihan program yang disetujui dalam APBD harus memperhatikan prefensi para pemilih.

Melihat tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing institusi tersebut diatas telah menunjukkan bahwa, peran DPRD dalam fungsi anggaran berorientasi politis yang harus memperhatikan janji ketika kampanye pemilu legislatif, yang mana semua caleg yang telah dipilih menjadi legislator daerah harus mengakumulasi kepentingan pemilih dalam wilayah pemilihnya program/usulan bidang kegiatan yang tercantum dalam usulan RAPBD.

Sebagai tindak lanjut dapat dilihat dalam pelaksanaan fungsi anggaran dari segi belanja dan pembiayaan.

1. Fungsi anggaran segi belanja

Pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD kabupaten/kota perlu merumuskan kebijakan dasar untuk setiap mata anggaran dalam RAPBD yang diusul oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota yang menurut Djojosoekarto dan Djayasinga mengatakan bahwa:

Berdasarkan pada analisis kondisi dan potensi daerah secara menyeluruh DPRD perlu merumuskan berbagai kebijakan dasar sektoral. Perumusan kebijakan sektoral ini mengacu pada kebijakan pembangunan nasional dan prioritas yang ditentukan daerah. Komponen-komponen dan indikator-indikator dasar perlu dirumuskan dan disepakati oleh DPRD dan pemerintahan daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran DPRD dalam fungsi anggaran menurut struktur belanja tidak langsung, belanja langsung, pengeluaran pembiayaan daerah dan sisa lebih anggaran tahun lalu. Semuanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja tidak langsung.

Belanja tidak langsung dalam struktur APBD kabupaten/kota terdiri atas delapan komponen sebagai berikut:

1) Belanja pegawai.

Belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan PNS, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta BKDH dan WBKH dan biaya pemungutan pajak daerah.

2) Belanja bunga

Belanja bunga atau pembayaran bunga atas pinjaman daerah termasuk salah satu komponen belanja daerah yaitu. Bunga atau pinjaman dan bunga atau obligasi.

3) Belanja subsidi

Belanja subsidi pemerintahan daerah kepada perusahaan atau lembaga tertentu berupa belanja subsidi kepada perusahaan daerah dan belanja subsidi kepada lembaga tertentu yang potensial dikembangkan.

4) Belanja hibah

Belanja daerah untuk keperluan hibah pemerintahan daerah kepada berbagai instansi yaitu belanja hibah kepada pemerintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusat, pemerintahan daerah lainnya, pemerintahan desa, perusahaan daerah/ BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta dan kelompok masyarakat/perorangan.

5) Belanja bantuan sosial

Belanja daerah untuk bantuan sosial pemerintahan daerah kepada berbagai instansi yaitu, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan belanja bantuan partai politik.

6) Belanja bagi hasil kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Terdiri atas, belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota, belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa, belanja bagi hasil retribusi daerah kepada kabupaten/kota dan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa.

7) Belanja bantuan keuangan kepada pemda dan pemerintahan desa.

Terdiri atas, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten atau kota, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa.

8) Belanja tidak terduga.

Belanja tidak terduga merupakan belanja daerah yang belum diketahui kapan pengeluarannya.

b. Belanja langsung.

Selain belanja tidak langsung yang telah diuraikan diatas, juga terdapat belanja langsung dalam struktur penyusunan dan penetapan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RAPBD menjadi APBD. Adapun usulan belanja langsung pemda kabupaten/kota kepada DPRD setiap tahun anggaran terdiri atas:

1. Belanja pegawai.
2. Belanja barang dan jasa.
3. Belanja modal.

2. Fungsi anggaran segi pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dalam struktur usulan RAPBD kabupaten/kota kepada DPRD pada setiap tahun anggaran terdiri dari 4 (empat) komponen (permendagri No. 13 tahun 2006) sebagai berikut:

a. Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan untuk pembiayaan daerah, dilakukan dengan memanfaatkan sisa anggaran yang belum terpakai sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan daerah dan sisa penghematan belanja.
2. Sisa belanja pegawai dari belanja tidak langsung.
3. Sisa belanja pegawai dari belanja langsung.
4. Sisa belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga.

Dana cadangan berfungsi untuk memenuhi keperluan tertentu yang bersifat mendesak dalam memenuhi pengeluaran pembiayaan daerah. Dengan demikian pemda tidak kekurangan dana dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penyertaan modal (infestasi) pemda.

Penyertaan modal atau infestasi pemerintah daerah kabupaten/kota setiap tahun anggaran sebagai berikut:

1. Badan usaha milik pemerintah (BUMN)
2. Badan usaha milik pemerintah daerah (BUMD)
3. Badan usaha milik swasta

c. Pembayaran pokok utang.

Pembayaran pokok utang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam usulan RAPBD kepada DPRD, tercantum dalam permendagri No 13 tahun 2006 sebagai berikut:

1. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah.
2. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah daerah lainnya.
3. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank.
4. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank.
5. Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah.
6. Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah lainnya.
7. Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank.
9. Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo.
10. Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo.

Semua pembayaran uang pokok dan pelunasan obligasi pemda sebagaimana yang disebutkan diatas, menjadi beban dalam APBD setiap tahun anggaran, sehingga mendapat sorotan tajam dari DPRD dalam pembahasan APBD. Dengan demikian pinjaman daerah dapat diperkecil bahkan kalau memungkinkan dilunasi.

d. Pemberian pinjaman daerah.

Komponen pemberian pinjaman daerah kabupaten/kota dalam usulan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi APBD pada setiap tahunan anggaran, tercantum dalam permendagri no 13 tahun 2006 adalah: pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah dan pemberian pinjaman daerah kepada daerah lain.

Khusus untuk komponen pemberian pinjaman daerah kepada pihak ketiga tidak semua daerah kabupaten/kota menerapkannya hanya daerah-daerah yang memiliki potensi PAD yang cukup dan APBD selalu surplus setiap tahun anggaran yang dapat menerapkannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran DPRD dari fungsi anggaran, memiliki urgensi yang perlu segera dibenahi dalam hal proses pembahasan dan penetapan sebagai salah satu produk peraturan daerah yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah yang menurut Heriyanto (2002) bahwa.

Untuk dapat mengefektifkan fungsi anggaran di DPRD, sebaiknya dilakukan berbagai pelatihan atas inisiatif anggota DPRD sendiri, yang pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi ataukah pemerintahan daerah setempat. Terutama untuk lebih meningkatkan kemampuan, kecakapan dan keterampilan dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Melakukan studi banding dengan daerah lain tentang pembahasan APBD untuk meningkatkan pengetahuan tentang proses pembahasan dan pengesahan RAPBD menjadi APBD yang dapat meningkatkan pembangunan daerah.

Para anggota DPRD juga perlu menyadari bahwa jabatan legislatif merupakan jabatan kehormatan yang membawa amanat rakyat, sehingga perlu memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, diantaranya menyusun anggaran pembelanjaan yang seimbang dengan potensi penerimaan / pendapatan yang akan diperoleh yang langsung manfaatnya dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat. Karena itu penyusunan APBD harus memperhatikan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas anggaran, dengan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip atau asas sistem defisit atau surplus anggaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.8 Konsep Fungsi Anggaran

Istilah anggaran (*bubgeting*) pada awalnya berarti sebagai dompet negara, dimana didalamnya ada pendapatan-pendapatan dan pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan di Inggris anggaran pada awalnya diartikan sebagai tas kulit menteri keuangan yang dibawa ke parlemen dimana didalamnya berisikan rencana-rencana akhir (Thahjanulin, 2010:51).

Menurut Azmy Achir (1975) dalam bukunya masalah pengurusan keuangan negara: suatu pengantar teknis yang mengutip dari beberapa pendapat pakar yaitu:

- a. Welsch: anggaran adalah suatu bentuk statement dari pada rencana dan kebijakan management yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk atau “*blue print*” dalam periode itu.
- b. Bukhari : anggaran merupakan kompas yang menunjukkan arah yang harus dianut oleh pemerintahan didalam menjalankan administrasi keuangan dan sekaligus merupakan roda yang dapat mengemudikan arahan.
- c. Marsono : anggaran adalah suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang sebesar-besarnya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan. Negara pada suatu masa depan, dan pada pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin dapat diterima dalam masa tersebut.

Menurut Munandar (2007: 714) anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supriyono (1999 : 34) anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk mewujudkan sumber-sumber akan diperoleh dan digunakan untuk selama jangka waktu tertentu.

Menurut Handoko (2003 : 377) pengertian anggaran adalah kuantifikasi rencana pameran, dan keuangan yang digunakan untuk mengarahkan operasional pendapatan, biaya, aktiva, kewajiban dan kegiatan usaha lainnya.

Fungsi anggaran DPR adalah hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program-program kerja pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.

Secara umum Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan model penganggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan mencerminkan program tahunan pemerintah daerah Hanif Nurcholis (2007 : 197).

Menurut Tjahjanulin Domai (2010 : 59) fungsi anggaran terbagi kedalam 7 macam sebagai berikut :

1. Alat perencanaan

Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi, yang berisikan rencana-rencana kegiatan/program yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dilaksanakan, rencana biaya yang akan dikeluarkan dan hasil yang akan dicapai. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan
 - b. Merencanakan berbagai program/kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan
 - c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
 - d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
2. Alat pengendalian

Anggaran berfungsi sebagai media yang penting untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan pelaksanaan. Anggaran sebagai alat pengendalian digunakan untuk:

- a. Menghindari adanya *over-spending*, *under-spending* dan salah sasaran pembiayaan pada kegiatan/program yang bukan prioritas
- b. Memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional kegiatan/program pemerintah.
- c. Meyakinkan kepada pihak masyarakat dan lembaga legislatif bahwa pemerintah mempunyai dana yang cukup untuk melaksanakan kewajibanya.
- d. Memberikan informasi bahwa pelaksanaan kegiatan/program dapat berjalan dengan efisien dan efektif serta tanpa ada pemborosan maupun korupsi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Alat kebijakan fiskal

Anggaran digunakan oleh pemerintahan sebagai alat untuk menstabilkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran pemerintah yang memuat arah kebijakan fiskal pemerintah.

4. Alat politik

Anggaran merupakan salah satu bentuk komitmen lembaga eksekutif dan kesepakatan lembaga legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

5. Alat koordinasi dan komunikasi

Anggaran tidak hanya memuat kegiatan/program dari suatu instansi atau departemen, melainkan melibatkan seluruh departemen bahkan hingga unit kerja (pelaksana) dalam struktur pemerintah.

6. Alat motivasi

Anggaran sebagai alat motivasi bagi pelaksanaannya agar bekerja secara ekonomis, efisien dan efektif dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan.

7. Alat penilai kerja

Anggaran merupakan wujud komitmen antar lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sedangkan kinerja manajer publik dinilai berdasarkan target yang dapat dicapai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa fungsi anggaran sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD
- b. Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota
- c. Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota
- d. Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota

2.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Undang-Undang No 17 Tahun 2003 pasal 11 butir 8 tentang keuangan negara).

Juli Panglima Seragih (2003:122) mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dasar dari pengelolaan keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat 4 UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, fungsi APBN/APBD terdiri dari:

- a. Fungsi otorisasi, anggaran daerah merupakan dasar untuk melakukan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan, anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

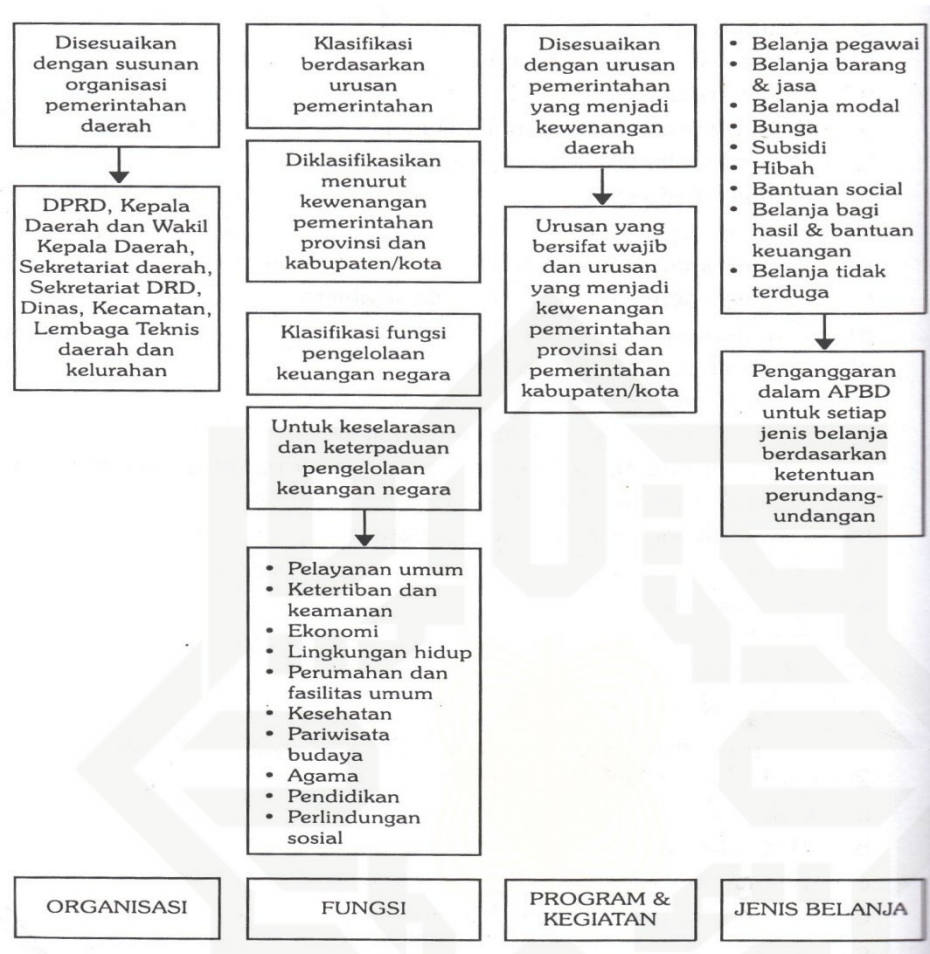
- c. Fungsi pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi, anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi, anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan keputusan.
- f. Fungsi stabilisasi, anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

2.9.1 Struktur APBD

Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Belanja diklasifikasi dalam urusan pemerintahan (wajib dan pilihan), organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja. Kelompok belanja dikategorikan dalam belanja langsung dan tidak langsung. Pendapatan dikelompokkan dalam pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Demikian pula pembiayaan disini meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Semuanya di strukturkan sebagai berikut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.2 Skema Klasifikasi Belanja Daerah

agar lebih jelas struktur APBD dapat dinarasikan seperti dibawah ini:

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Pajak daerah
 - b) Retribusi daerah
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d) Lain-lain PAD yang sah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dana perimbangan
 - a) Dana bagi hasil
 - b) Dana alokasi umum (DAU)
 - c) Dana alokasi khusus (DAK)
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - a) Hibah
 - b) Dana darurat
 - c) Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pe,da lainnya
 - d) Dana penyesuaian dan dana OTSUS
 - e) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.
2. Belanja
- a. Belanja tidak langsung
 - a) Belanja pegawai
 - b) Belanja bunga
 - c) Belanja subsidi
 - d) Belanja hibah
 - e) Belanja bantuan sosial
 - f) Belanja bagi hasil
 - g) Bantuan keuangan
 - h) Belanja tak terduga
 - b. Belanja langsung
 - a) Belanja pegawai
 - b) Belanja barang dan jasa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Belanja modal

3. Pembiayaan

a. Penerimaan pembiayaan

- a) Selisih dari perhitungan (SILPA) anggaran tahunan sebelumnya
- b) Pencairan dana cadangan
- c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Penerimaan pinjaman daerah
- e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman
- f) Penerimaan piutang daerah

b. Pengeluaran pembiayaan

- a) Pembentukan dana cadangan
- b) Penyertaan modal pemda
- c) Pembayaran pokok utang
- d) Pemberian pinjaman

Berdasarkan pemendagri No. 13 Tahun 2006, “ struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:

1. Anggaran pendapatan daerah, terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lainnya.
- b. Bagian dana perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus(DAK).
- c. Pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Anggaran belanja daerah, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3. Pembiayaan daerah, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.9.2 Tahap Penyusunan APBD

Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa dokumen perencanaan yang harus ada di daerah untuk jangka panjang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Dokumen tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang wajib disusun oleh Kepala Daerah terpilih. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2) yang menegaskan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ini dirinci tiap tahun untuk dijadikan sebagai Rencana Tahunan Daerah yang dikenal dengan nama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Bupati). Sesuai Peraturan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 82 ayat (2) bahwa penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.

Oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selanjutnya menjabarkan RPJMD yang sudah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke dalam Rencana Strategis (Renstra SKPD). Renstra SKPD ini berisi rencana tugas masing-masing unit dalam SKPD, yang secara keseluruhan digabung menjadi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) tersebut selanjutnya dirinci untuk tiap tahun sebagai Rencana Tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah ditetapkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 45 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Setelah penandatanganan persetujuan bersama antara Kepala daerah dengan DPRD selesai, maka pembahasan rencana kegiatan dan anggaran (RAPBD) telah berakhir, dan atas dasar keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut di atas, Kepala Daerah selanjutnya menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Dalam rangka penetapannya secara sah, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sudah dibahas, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, sedang Kabupaten/Kota ke Bupati untuk dievaluasi. Keharusan evaluasi terhadap kedua dokumen perencanaan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 47 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa : (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Ketentuan seperti ini juga berlaku bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten dan Kota yang wajib dievaluasi oleh Bupati yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dokumen berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri bagi Kabupaten, dan Bupati bagi Kabupaten/Kota, hasil evaluasinya dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri/Bupati, dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Mengenai ketentuan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan penjabarannya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Pasal 116 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sebagai berikut :

- 1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- 2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Dengan ditetapkannya kedua dokumen anggaran tersebut, maka berarti bahwa seluruh materi atau muatan yang ada dalam Rancangan APBD telah disetujui untuk dilaksanakan, dengan kata lain bahwa proses atau tahap perencanaan, pembahasan dan penetapan anggaran telah berakhir untuk tahun anggaran yang bersangkutan. UU 32 tahun 2004 menyatakan bahwa DPRD bersama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

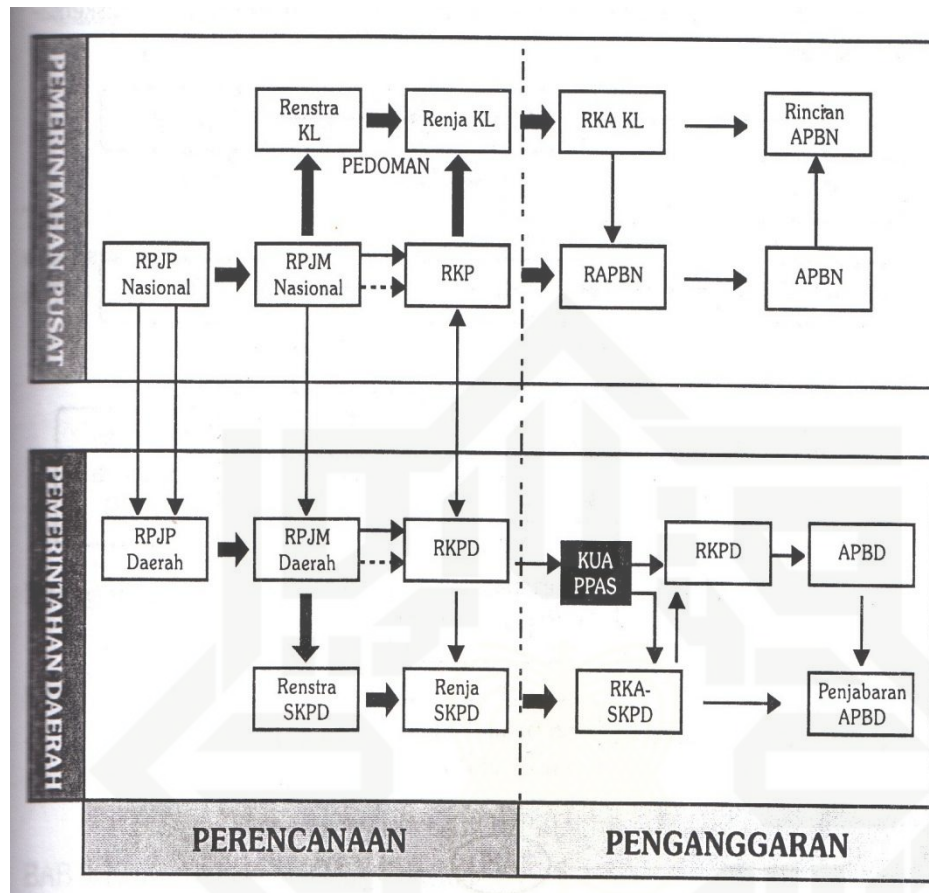
Kepala Daerah menetapkan APBD. Tata cara dan prosedur penyusunan APBD sebagai berikut:

- a. Dalam rangka menyiapkan RAPBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijaksanaan umum APBD
- b. Berdasarkan arah dan kebijaksanaan umum APBD, Pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
- c. Berdasarkan strategi dan prioritas yang telah ditetapkan, Pemerintah daerah menyiapkan RAPBD.
- d. Kepala Daerah menyerahkan RAPBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- e. Sebelum disetujui, DPRD membahas RAPBD berdasarkan tata tertib yang ada.

Dalam menyusun anggaran (APBD) hal terpenting yang harus diperhatikan adalah memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam sinkronisasi perencanaan pembangun dan penganggaran harus menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi serta pengendalian. Agar nampak lebih jelas keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran, maka dapat dilihat skema dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

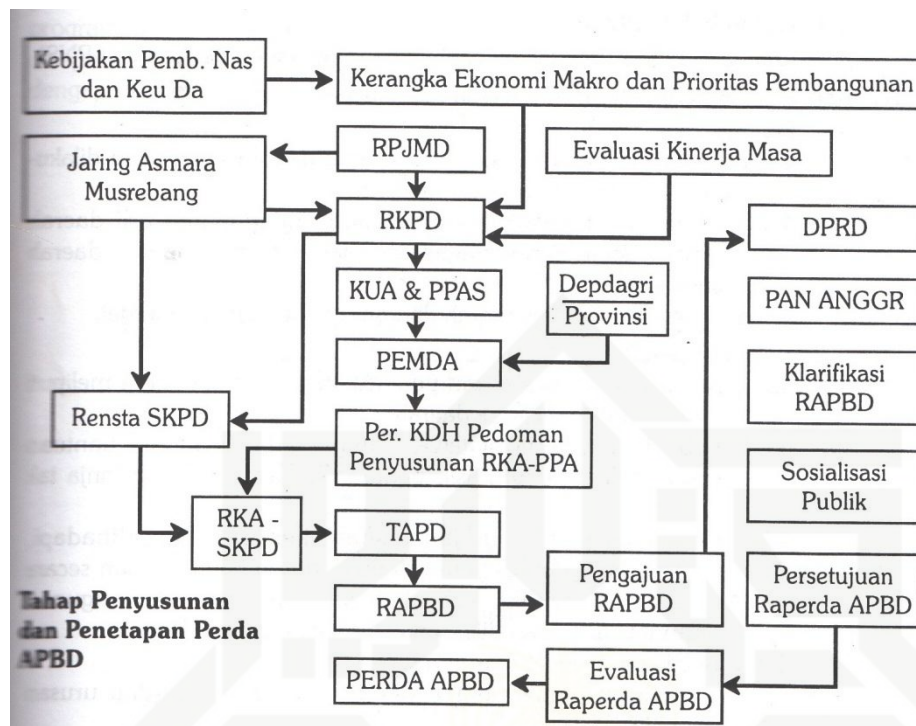


Gambar 2.3 Kaitan Antar Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Penganggaran

Sementara keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran dalam proses dari tahap penyusunan sampai penetapan anggaran (APBD) dapat diskemakan seperti dibawah ini:

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.4 Penyusunan KUA dan PPAS dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

Untuk lebih jelas mengenai dimulainya pengajuan KUA PPAS ke DPRD sampai dengan tahap penetapan APBD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Idealnya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

No	Proses Penyusunan	Tanggal/Bulan Pengajuan
1	KUA-PPAS	Minggu ke-2 bulan juni
2	Raperda APBD	Minggu pertama bulan Oktober
3	Perda APBD	31 Desember tahun anggaran sebelumnya

Sumber: Buku Referensi

2.10 Pandangan Islam tentang Pemerintahan

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam sistem dan prinsip NKRI. Dalam islam pemerintahan tecantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an surat Ali'Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: maka berkat rahmat allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada allah. Sungguh allah mencintai orang yang bertawakal.

Selain ayat diatas juga terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemerintahan antara lain dalam sirat Asy-Syura ayat 38 berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: dan (bagi) oraang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagai dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.

2.11 Defenisi Konsep

Defenisi konsep berguna untuk menghindari penefsiran yang berbeda-beda dan kesalahan dalam pengertian mengenai konsep-konsep yang ada pada penelitian. Maka dirumuskan beberapa konsep yang digunakan dalam teknik pengujian dan penelitian ini adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta DPRD dan dibantu oleh organisasi perangkat daerah.
- d. Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- e. Fungsi anggaran DPRD adalah sebagai alat untuk mengatasi ketimpangan fiskal secara vertikal, fiskal horizontal dengan kemampuan fiskal untuk menentukan celah fiskal.

2.12 Indikator Penelitian

Indikator adalah variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi pada sebuah kejadian ataupun kegiatan, adapun indikator penelitian tersebut diambil dari peraturan perundang-undang yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1

Konsep Operasional Penelitian Analisis Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variabel	Indikator	Sub-Indikator
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Fungsi Anggaran DPRD dalam Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/ walikota b. Membahas rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD c. Membahas rancangan perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD d. Membahas rancangan perda APBD Kabupaten/kota tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	a. Membahas KUA berdasarkan RKPD b. Membahas PPAS yang disusun oleh bupati berdasarkan RKPD a. Membahas rancangan perda APBD berdasarkan RKA-SKPD b. Menyusun raperda APBD berdasarkan nota keuangan dan RAPBD c. Persetujuan raperda APBD bersama DPRD dan kepala daerah a. Membahas rancangan perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD a. Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Sumber : UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.13 Kerangka Berfikir

Pada kerangka berfikir ini penelitian memberikan penjelasan mengenai apa yang dicari dalam bentuk gambaran yang disajikan dibawah ini:

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran

